ABSTRAK

Kabupaten Tegal memiliki banyak sentra industri yang berpotensi menjadi produk unggulan masyarakat. Produk-produk unggulan tersebut masih ada yang mereknya belum didaftarkan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan, artinya untuk memperoleh perlindungan maka merek harus didaftarkan.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal, dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal adalah dengan melakukan fasilitasi pendaftaran merek. Fasilitasi tersebut berupa penyediaan dana dan sosialisasi untuk pendaftaran merek. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal yaitubelum adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan HKI termasuk merek bagi produk-produk yang ada di Kabupaten Tegal, pandangan yang menganggap bahwa tidak pentingnya perlindungan pada merek menurut masyarakat, hal tersebut mengakibatkan para pelaku usaha tidak mendaftarkan mereknya, dan jangka waktu permohonan pendaftaran merek sampai dengan terbitnya sertifikat hak merek terlalu lama. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal belum optimal, karena belum ada peraturan daerah yang mengaturnya, serta kesadaran masyarakat terhadap pemilikan merek terdaftar masih rendah dan dalam proses pendaftaran merek memakan waktu yang lama.

Saran dari penulis adalah dibentuknya peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek bagi produk-produk yang ada di Kabupaten Tegal, dilakukan penyuluhan yang lebih mendalam dan tepat sasaran pada masyarakat, lebih sering melakukan koordinasi dengan pemohon merek, Klinik HKI, dan Ditjen HKI.

Kata kunci : peran, pemerintah daerah, perlindungan merek, produk unggulan

ABSTRACT

Tegal Regency has many industrial centers that have the potential to become superior products of the community. There are still superior products whose brands have not yet been registered. According to Article 3 of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the right to a mark is obtained after the mark is registered, meaning to obtain protection, the mark must be registered. The formulation of the problem in this study is how the role of the Tegal Regency government towards the protection of trademarks in the superior products of the Tegal Regency area, and the problems faced by the Tegal Regency government towards the trademark protection of the Tegal Regency superior products.

The research method used is an empirical juridical approach, with the research specification used is analytical descriptive.

The results showed that the role of the Tegal Regency Government on the protection of trademarks in the superior products of the Tegal Regency area was to facilitate the registration of trademarks. The facilitation is in the form of providing funds and outreach for trademark registration. The problem faced by the Tegal Regency Government on the protection of trademarks in the superior products of the Tegal Regency is that there are no regional regulations or regent regulations that regulate IPR protection including trademarks for products in Tegal Regency, a view that considers that it is not important protection of trademarks according to the community, this results in business actors not registering their marks, and the period of application for registration of trademarks until the issuance of a certificate of trademark rights is too long. From the result of the study it can be concluded that the role of the Tegal Regency government on the protection of trademarks in the superior products of the Tegal Regency is not optimal, because there are no local regulations governing it, and public awareness of ownership of registered trademarks is still low and the trademark registration process takes a long time.

Suggestions from the author are the establishment of regional regulations or regents regulations which regulate the protection of Intellectual Property Rights including trademarks for products in Tegal Regency, do more in-depth and targeted counseling to the community, more often coordinate with the brand applicant, IPR clinics, and DG IPR.

Keywords: role, local government, brand protection, superior products